

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku**

- Alfitra. *Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata, dan Korupsi di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Raih Asa Sukses, 2011.
- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 2015.
- . *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010.
- Asosiasi Pengajar Hukum Pidana dan Kriminologi (ASPERHUPIKI). *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Versi Akademisi)*. Jakarta: ASPERHUPIKI, 2025.
- Badan Pemeriksa Keuangan. *Prosedur Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah*. Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan, 2018.
- Effendi, Erdianto. *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama, 2011.
- Follet, Mary Parker. *Manajemen*. Jakarta: Indeks, 2005.
- Fuady, Munir. *Teori Hukum Pembuktian: Pidana dan Perdata*. Bandung: Citra Aditya, 2006.
- Gunadi, Ismu, dan Jonaedi Efendi. *Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Edisi ke-2, Cetakan ke-9. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- . *Korupsi di Indonesia dan Pemecahannya*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014.
- Hiariej, Eddy O. S., dkk. *Bunga Rampai Hukum Pidana Khusus*. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.
- . *Teori dan Hukum Pembuktian*. Jakarta: Erlangga, 2012.

- Ibrahim, Johny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Surabaya: Bayumedia, 2008.
- Kartono, Kartini. *Patologi Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia. *Modul Materi Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, 2019.
- Lamintang, P.A.F. *Dasar Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bhakti, 1997.
- Margono. *Asas Keadilan Kemanfaatan & Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2009.
- . *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Cetakan ke-9. Jakarta: Prenada Media Grup, 2016.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Cetakan ke-10. Yogyakarta: Liberty, 2019.
- Moleong, Lexy Johannes. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016.
- Muhtada, Dani, dan Ayon Diniyanto. *Dasar-Dasar Ilmu Negara*. Semarang: BPFH UNNES, 2018.
- Mukhlis, M. Iqbal, dan Nurhafifah. *Mengungkap Perkara dalam Hukum Pembuktian Pidana*. Diedit oleh Tarmizi. Banda Aceh: Bandar Publishing, 2021.
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: CV. Mandar Maju, 2008.
- Nelson, Febby Mutiara. *Plea Bargaining dan Deferred Prosecution Agreement dalam Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.

- Prinst, Darwin. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional Dan Internasional*. Jakarta: PT RadjaGrafindo Persada, 2004.
- Qamar, Nurul, dan Farah Syah Rezah. *Metode Penelitian Hukum: Doktrinal dan Non-Doktrinal*. Makassar: CV. Social Politic Genius [SIGn], 2020.
- Rahardjo, Satjipto. *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas, 2007.
- Rahmadi, Takdir. *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Edisi Kedua. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Ranoemihardja, R. Tatang. *Hukum Acara Pidana*. Bandung: Pradnya Paramita, 1976.
- Renggong, Ruslan. *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik di Luar KUHP*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Saidi, Muhammad Djafar. *Hukum Keuangan Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Salle, Agustinus, Paulus K. Allo Layuk, dan Bill J.C. Pangayouw. *Keuangan Negara & Daerah: Konsep, Struktur dan Siklus*. Jayapura: Magister Keuangan Daerah Universitas Cenderawasih, 2021.
- Sasangka, Hari, dan Lily Rosita. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*. Bandung: Mandar Maju, 2003.
- Soeharsodan Ana Retnoningsih. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Sinar Gratika, 2007.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2012.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Press, 2003.
- Sofyan, Andi. *Hukum Acara Pidana*. Makassar: Kencana, 2014.
- Sugono, Dendy. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Sulaiman, Alfin. *Keuangan Negara Pada BUMN Dalam Perspektif Hukum*. Bandung: PT. Alumni, 2011.

Syauket, Amalia, dan Dwi Seno Wijanarko. *Buku Ajar Tindak Pidana Korupsi*. Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2024.

Syah, Zaharah Azhim. *Laporan Hasil Pemantauan Tren Korupsi Tahun 2024*. Jakarta: Indonesia Corruption Watch, 2025.

### **Artikel Jurnal Ilmiah**

Aziezi, Muhammad Tnziel. "Mencari Solusi Atas Masalah Pidanaan Suatu Kebijakan dengan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia." *Indonesia Criminal Law Review* 1, no. 2 (2022): 135–150.

Brashears, Matthew E., Michael Genkin, dan Chan S. Suh. "In the Organization's Shadow: How Individual Behavior is Shaped by Organizational Leakage." *American Journal of Sociology* (2017): 787–812. <http://dx.doi.org/10.1086/693703>.

Caesar, Ciprian, Hibnu Nugroho, Budiyo, dan Sulistyandari. 2025. "Reconstructing the Meaning of State Losses in Corruption Crimes: A Progressive Legal Perspective." *Architectural Image Studies* 6 (3): 1823–1834. <https://doi.org/10.62754/ais.v6i3.524>.

Fadly, Ovan Setyawan, Vience Ratna Multiwijaya, dan Aprima Suar. "Tindak Pidana Kejahatan Korporasi dalam Kasus Korupsi Timah di Bangka Belitung." *Ensiklopedia of Journal* 6, no. 4 (2024): 210–218.

Hafel, Muhlis, dan Abdul Halil H Ilham. "Budget Politics in Indonesia: Processes, Challenges, and Economic Implications." *International Research Journal of Management, IT and Social Sciences* 11, no. 4 (2024): 158–168. <https://doi.org/10.21744/irjmis.v11n4.2457>.

Hartanto, Ponco, Subagio Gigih Wijaya, dan Riami Chancy. "Discourse of Ecological Damage as a State Financial Loss: Evidence from Indonesia." *Journal of Law, Environmental and Justice* 2, no. 3 (2024): 320–335.

- Karunia, Ana Aniza. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Teori Lawrence M. Friedman." *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi* 10, no. 1 (2022): 120–135. <https://doi.org/10.20961/hpe.v10i1.62831>.
- Mallarangeng, Andi Bau, Mustari, Firman, dan Ismail Ali. "Pembuktian Unsur Niat Dikaitkan Dengan Unsur Mens Rea Dalam Tindak Pidana Korupsi." *LEGAL: Journal of Law* 2, no. 2 (November 2023): 11–24.
- Najmuddin, M. Naufal, dan Romlan. "Tinjauan Yuridis Kerugian Keuangan Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi." *Justicia Journal* 13, no. 1 (2024): 50–65. <https://doi.org/10.32492/jj.v13i1.13106>.
- Pebrianto, Roli, Noviana Noviana, Muhammad Panji Prabu Dharma, dan Syarif Dahlan. "Analisis Unsur Kerugian Keuangan Negara dalam Perkara Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat Sistem Bayar Panen (Studi Kasus Putusan Nomor 41/Pid.Sus.TPK/2024/PN. MTR)." *Referendum: Jurnal Hukum Perdata dan Pidana* 2, no. 4 (2025): 90–105. <https://doi.org/10.62383/referendum.v2i4.1442>.
- Pertiwi, Permata Bela, dan Muhammad Reyhan Daru Qunthi. "Kerugian Keuangan Negara dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Perspektif Yuridis Normatif." *Rechtents Journal* 4, no. 2 (2023): 189–202. <https://doi.org/10.35719/rch.v4i2.299>.
- Prasetyo, Bayu, dan Roesman Hadi Jaya. "Pertanggungjawaban Hukum Tindak Pidana Korupsi Oleh Pejabat Tata Usaha Negara." *Jurnal Hukum Pidana & Kriminologi* 5, no. 1 (2024): 25–38. <https://doi.org/10.51370/jhpk.v5i1.180>.
- Rahayu, Dilla Pratiwi Puji, Lalu Parman, dan Zainal Asikin. "Kewenangan Penuntutan Tindak Pidana Pencucian Uang pada Komisi Pemberantasan Korupsi." *Indonesia Berdaya* 4, no. 2 (2023): 650–665. <https://doi.org/10.47679/ib.2023470>.

Saputra, Andi. "Dari Putusan ke Penegakan: Paradoks Penegakan Hukum dalam Kasasi Perkara Timah Nomor 5009 K/Pid.Sus/2025." Dalam *Konferensi Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara Dan Hukum Administrasi Negara* 3, no. 1 (2026). <https://doi.org/10.55292/4vr2q922>.

Simanjuntak, Ayub Jose Luhut Parulian, dan Heryanto. "Pengembalian Dan Pembuktian Kerugian Keuangan Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi." *Rio Law Jurnal* 6, no. 2 (2025): 1015–1030. <http://dx.doi.org/10.36355/.v1i2>.

Suta, I Made Gemet Dananjaya, I Gusti Agung Mas Prabandari, dan Ni Luh Gede Astariyani. "Determining State's Financial Losses in Corruption: An Institutional Power and Constraint in Indonesia." *Lentera Hukum* 8, no. 1 (2021): 100–120. <https://doi.org/10.19184/ejrh.v8i1.21923>.

### **Skripsi dan Disertasi**

Ramadhani, Tania Hasna Salsabila. "Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Sistem Pembuktian Terbalik Pada Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg dan Putusan Perkara Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Yyk)." Skripsi, Universitas Tidar, 2025.

Riyadi, Bambang Slamet. "Budaya Korupsi dalam Pengelolaan Sumber Daya Minyak dan Gas Alam di Indonesia." Disertasi, Universitas Indonesia, 2021.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.

### **Putusan**

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 25/PUU-XIV/2016.

Putusan Mahkamah Agung Nomor: 5009 K/Pid.Sus/2025.

### **Website Internet**

Nainggolan, Marsudin. "Sistem Pembuktian Terbuka Dalam KUHAP Baru, Era Baru Peradilan Pidana Indonesia." *Dandapala*, 24 November 2025. <https://dandapala.com/article/detail/sistem-pembuktian-terdeka-dalam-kuhap-baru-era-baru-peradilan-pidana-indonesia>.

Saputra, Yulian. "Hukuman Harvey Moeis Diperberat Jadi 20 Tahun Penjara, Prabowo Pernah Sindir." *Infobanknews*, 13 Februari 2025. <https://infobanknews.com/hukuman-harvey-moeis-diperberat-jadi-20-tahun-penjara-prabowo-pernah-sindir/>.

## **Wawancara**

Triyana Setia Putra. *Wawancara*. Kejaksaan Agung Republik Indonesia, 7 Maret 2026.